

**SINERGITAS ANTAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KEBAKARAN DI KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANDA ACEH**

Siti Khadijah^{1*}, Siti Nur Zalikha²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

*Korespondensi : 210802003@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Kota Banda Aceh merupakan salah satu Kota yang padat penduduk, maka dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), seperti keterbatasan akses dalam lintas armada kebakaran, koordinasi dengan instansi terkait, serta partisipasi masyarakat. Teknik pengumpulan data seperti Wawancara, Observasi terstruktur dan tersamar dan Dokumentasi. Sumber Data yaitu Data Primer diperoleh dari wawancara semi terstruktur terhadap Kasi Kesiapsiagaan, Kasi Logistik dan kedaruratan, dan Kasi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, data sekunder diperoleh dari Media Massa, Undang-Undang, Dokumen dan Data Publikasi. Teknik Analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) serta Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh maka menunjukkan bahwa sinergitas antar lembaga dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan baik. Setiap instansi terkait bersama sama melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Kata Kunci : Sinergitas, Penanggulangan, Kebakaran.

ABSTRACT

Banda Aceh City is one of the densely populated cities, so in the implementation of fire fighting, there are various challenges faced by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and the Fire and Rescue Service (DPKP), such as limited access to cross-fire fleets, coordination with related agencies, and community participation. Data collection techniques such as Interviews, Direct and Covert Observations and Documentation. Data Sources, namely Primary Data obtained from semi-structured interviews with the Head of Preparedness, Head of Logistics and Emergency, and Head of Rehabilitation of the Banda Aceh City Regional Disaster Management Agency and the Head of Prevention and Preparedness and Head of Extinguishing and Rescue of the Banda Aceh City Fire and Rescue Service, secondary data obtained from the Mass Media, Laws, Documents and Publication Data. Data Analysis Techniques, namely Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. Based on the results of the

research conducted by researchers at the Fire and Rescue Service (DPKP) and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Banda Aceh City, it shows that synergy between institutions in handling fire disasters in Banda Aceh City has been implemented well. Each related agency jointly carries out coordination according to their respective duties and authorities.

Keywords : Synergy, Handling, Fire.

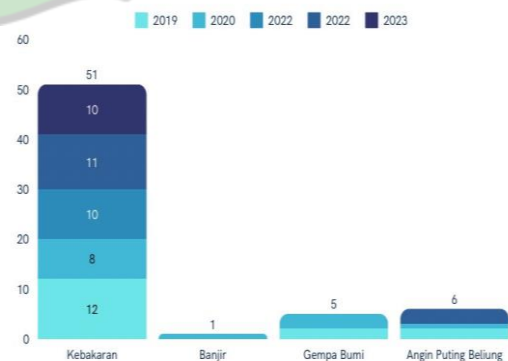
A. PENDAHULUAN

Bencana merupakan suatu rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Pergub Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja BPBA). Bencana terbagi dalam tiga jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial (*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana* 2007). Salah satu jenis bencana yang dapat digolongkan sebagai bencana alam dan bencana non alam berdasarkan penyebab terjadinya adalah kebakaran (Depriyanti 2022). Bencana alam yang menjadi penyebab kebakaran di pemukiman antara lain adalah sambaran petir, kekeringan, panas matahari yang meningkat. Sementara bencana non alam yang sering menjadi penyebab kebakaran di pemukiman seperti hubungan arus pendek, ledakan kompor gas, ledakan gas, system kelistrikan yang buruk, pembuangan puntung rokok sembarangan, sabotase, kurangnya pengamanan kebakaran di gedung, serta kurangnya pengawasan terhadap bahan kimia yang mudah terbakar. Kebakaran ini biasanya menyerang pemukiman yang padat akan

penduduk (Dendi, Febriyanti, and Isabella 2022).

Kebakaran yang menyerang pemukiman padat penduduk umumnya terjadi di wilayah perkotaan (Pane, Rejoni, and Malikussaleh 2012). Indonesia memiliki 93 kota otonom dan salah satunya terletak di semenanjung barat Indonesia yaitu Kota Banda Aceh. Dengan Jumlah penduduk sebanyak 262,96 ribu jiwa data per 2024, Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota besar di Indonesia yang masih rentan terhadap ancaman kebakaran (Disdukcapil 2024). Potensi bencana kebakaran di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Data Bencana di Kota Banda Aceh Tahun 2019 sampai dengan 2023



Sumber: Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Kebakaran menjadi bencana yang paling sering terjadi di Kota Banda Aceh. Tahun 2019 jumlah bencana kebakaran yang terjadi sebanyak 12 kali, pada tahun 2020 bencana kebakaran terjadi sebanyak 8 kali, pada tahun 2021 jumlah bencana kebakaran yang terjadi sebanyak 10 kali, pada tahun 2022 jumlah bencana kebakaran yang terjadi sebanyak 11 kali dan pada tahun 2023 jumlah bencana kebakaran yang terjadi sebanyak 10 kali.

Kebakaran yang terjadi memiliki dampak yang signifikan terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pada kawasan perkotaan. Kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, namun juga dapat menyebabkan korban jiwa serta trauma yang mendalam bagi masyarakat yang terkena dampaknya (Marfuah, Sunardi, and Dewi 2020). Pertumbuhan jumlah penduduk mendorong peningkatan jumlah bangunan yang terpusat dalam satu area, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran dan timbulnya korban jiwa. Di wilayah perkotaan yang padat, kebakaran dapat dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Sebaran api dapat menyebabkan kerusakan menjadi lebih luas (Saragih and Lestari 2023).

Sebagai contoh penanganan kebakaran pada satu unit rumah yang terjadi di kawasan Lueng Bata-Kota Banda Aceh, dimana pihak pemadam kebakaran kesulitan masuk ke area kebakaran akibat mobil pemadam kebakaran tidak bisa melintasi ruas jalan yang sempit. Hal seperti ini menjadi salah satu tantangan yang di tangani oleh pihak pemadam kebakaran dalam penanganan bencana kebakaran di kawasan permukiman (Asri

2022). Dalam menangani kebakaran ini, terdapat beberapa aktor dalam menangani kebakaran tersebut seperti Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP). BPBD Kota Banda Aceh dan DPKP memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan mitigasi bencana kebakaran.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dikarenakan Kota Banda Aceh termasuk Kota yang padat penduduk, maka dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), seperti keterbatasan akses dalam lintas armada kebakaran, keterbatasan sumber daya, koordinasi dengan instansi terkait, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji Sinergitas Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini adalah Bagaimana koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) kota Banda Aceh terkait mitigasi bencana kebakaran dan Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Banda Aceh dalam bencana kebakaran.

Kebaruan pada penelitian ini yaitu kebaruan pada Fokus Sinergitas BPBD dan DPKP, dimana pada penelitian sebelumnya oleh Siti Muthmainnah, berfokus pada Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman Di Kota Langsa Provinsi Aceh (Muthmainnah 2022). Hal

yang sama pada jurnal oleh Dhandi Tri Cahyo dan Deded Chandra, yang berfokus pada Analisis Tingkat Risiko Kebakaran Pemukiman Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (Cahyo and Chandra 2023) dan yang terakhir penelitian oleh Annisa Rahmawati, yang berfokus pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (A. Rahmawati 2022).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sinergitas diartikan oleh Najianti dalam Rahmawati et al. adalah perpaduan berbagai unsur atau komponen yang, jika dibangun secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan, dapat menghasilkan output yang lebih optimal. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang terbentuk melalui kerja sama yang saling menguntungkan, dengan landasan pemikiran yang rasional, terbuka, dan demokratis. Sinergitas dapat dibentuk melalui dua pendekatan utama, yakni komunikasi dan koordinasi (T. Rahmawati 2014).

Komunikasi adalah proses menyampaikan informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu individu ke individu lainnya. Aktivitas ini memungkinkan pihak lain memahami dan menafsirkan suatu ide, khususnya bagaimana yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis. Menurut Sofyandi dan Garniwa menjelaskan pengertian Komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu: (1) komunikasi yang berfokus pada sumber, yang mengartikan komunikasi sebagai suatu tindakan di mana seseorang secara aktif menyampaikan rangsangan untuk

memperoleh respons; dan (2) komunikasi yang berfokus pada penerima, yang memandang komunikasi sebagai setiap aktivitas di mana individu (penerima) memberikan respons terhadap suatu rangsangan. Koordinasi menurut Silalahi menjelaskan bahwa adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Terdapat 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu: **Hubungan langsung**, Koordinasi cenderung lebih mudah terwujud melalui interaksi pribadi secara langsung (Dwinugraha 2017).

Kemudian **Kesempatan awal**, Koordinasi lebih mudah tercapai pada tahap awal perencanaan dan penyusunan kebijakan, ketiga **Kontinuitas Koordinasi**, merupakan Proses yang berkelanjutan dan harus dilakukan sepanjang waktu, mulai dari tahap perencanaan, keempat **Dinamisme**, Koordinasi perlu diubah secara terus-menerus seiring dengan perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, kelima **Tujuan yang jelas**, Adanya tujuan yang jelas sangat penting untuk mencapai koordinasi yang efektif.

Selanjutnya **Organisasi yang sederhana**, Struktur organisasi yang sederhana mempermudah tercapainya koordinasi yang efektif, ketujuh **Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas**, Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi konflik antar pegawai yang berbeda, tetapi juga memudahkan mereka bekerja dengan tujuan yang sama, kedelapan **Komunikasi yang efektif**, Komunikasi yang efektif adalah salah satu faktor penting untuk mencapai koordinasi yang baik dan terakhir **Kepemimpinan supervisi yang**

efektif, Kepemimpinan yang efektif memastikan koordinasi kegiatan antar individu, baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap implementasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dipilih dengan pertimbangan agar dapat menjelaskan fenomena sinergitas yang dilakukan oleh DPKP dan BPBD Kota Banda Aceh dalam penanganan kebakaran kawasan permukiman di Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data seperti Wawancara, Observasi terstruktur dan tersamar dan Dokumentasi. Sumber Data yaitu Data Primer diperoleh dari wawancara semi terstruktur terhadap Kasi Kesiapsiagaan, Kasi Logistik dan kedaruratan, dan Kasi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, data sekunder diperoleh dari Media Massa, Undang-Undang, Dokumen dan Data Publikasi. Teknik Analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2020).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa terdapat 3 jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Salah satu bagian dari jenis bencana tersebut adalah bencana kebakaran. Kebakaran adalah bencana yang termasuk pada bencana alam dan juga bencana non alam berdasarkan penyebab

terjadinya. Biasanya kebakaran ini menyerang pemukiman yang padat akan penduduk (Nurwulandari 2017). Terdapat dua indikator yang dapat dihasilkan untuk mengukur sinergitas antar BPBD dan DPKP Kota Banda Aceh dalam penanggulangan bencana Kebakaran di Kota Banda Aceh yaitu: Koordinasi antara DPKP dan BPBD Kota Banda Aceh dan Komunikasi antara BPBD dan DPKP Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Kebakaran.

1. Komunikasi antara BPBD dan DPKP Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Kebakaran

Komunikasi kebencanaan sangat penting dilakukan baik itu pada saat kondisi darurat bencana maupun kondisi pra bencana. Komunikasi tentang kebencanaan perlu didukung oleh data dan informasi yang tepat dan terintegrasi. Komunikasi bencana dilakukan sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana yang melibatkan berbagai pihak baik itu lembaga pemerintah, masyarakat dan juga para relawan (Fardiah et al. 2023). Dengan demikian Komunikasi antar lembaga ini berlangsung dari tingkat atas hingga tingkat terbawah pemerintahan, yang selanjutnya mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana (Jumansyah et al. 2021).

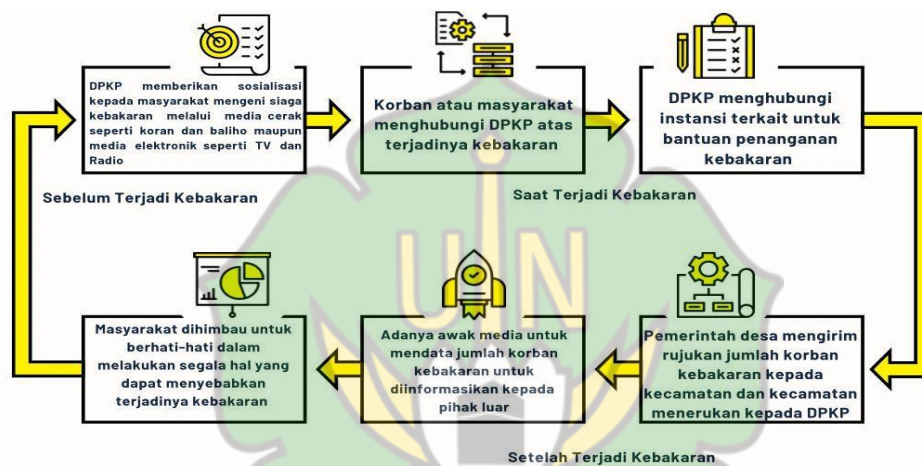
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bentuk komunikasi antara BPBD dan DPKP dalam penanggulangan kebakaran di Kota Banda Aceh adalah komunikasi lintas sektor. Adapun komunikasi lintas sektor adalah proses pertukaran informasi dan koordinasi antara berbagai sektor dan lembaga yang berbeda dengan keterlibatan prinsip yang sama, saling ketergantungan, pemahaman peran

masing-masing dan memiliki tujuan yang sama (Suratman, Damayanti, and Azzahla 2023).

Sedangkan pola komunikasinya adalah komunikasi transaksional dimana proses komunikasi yang berlangsung dua arah di mana pengirim dan penerima pesan

bersama-sama bertanggung jawab atas dampak yang timbul dari proses komunikasi (Ramadhan 2016). Adapun alur komunikasi antara BPBD dan DPKP dalam penanggulangan kebakaran di Kota Banda Aceh yaitu:

Gambar 2. Alur Komunikasi antara BPBD dan DPKP Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Kebakaran



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Pada saat penanggulangan kebakaran, informasi kebakaran tersebut dikomunikasikan melalui media telepon, baik itu dari pihak korban atau masyarakat menghubungi instansi terkait melalui media telepon maupun pihak DPKP menghubungi instansi lain juga melalui media telepon. Penanganan kebakaran ini juga berhubungan dengan awak media seperti dalam permintaan data jumlah rumah kebakaran baik dalam bentuk tertulis maupun wawancara. Dalam hal pemerintah desa dan masyarakat rujukannya langsung pada kecamatan, dari kecamatan kirim surat ke DPKP atas hasil pendataan mereka atas hal yang berdampak korban kebakaran.

Terkait mediasi atau sarana yang digunakan bisa dengan media elektronik seperti RRI dan juga TV lokal dan juga melakukan sosialisasi melalui media cetak seperti koran yang berisi himbauan, dan juga menggunakan baliho yang ada di Kota Banda Aceh untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai kebakaran maupun bencana lainnya untuk selalu siaga.

2. Koordinasi antara DPKP dan BPBD Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Kebakaran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa bentuk koordinasi antara DPKP dan BPBD Kota Banda Aceh yaitu:

Gambar 3. Koordinasi antara DPKP dan BPBD Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Kebakaran



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Terkait dengan tugas dan fungsi untuk melakukan pemadaman ataupun di awal evakuasi, itu merupakan tugas DPKP Kota Banda Aceh. Untuk koordinasi maupun kolaborasi tetap dilakukan dengan dinas terkait bukan hanya dengan BPBD tetapi juga dengan TNI/POLRI mengenai penanganan kebakaran atau musibah bencana. Setelah operasional pemadam kebakaran selesai, maka barulah koordinasi dengan pihak-pihak instansi terkait seperti BPBD yang mendukung bantuan logistik atau tempat berteduh sementara atau pengungsian bagi korban kebakaran yang luas. Pihak instansi terkait, hanya memberikan bantuan bagi korban yang bangunnya terbakar 50% sampai 100%. Jika terjadi kebakaran kecil dan pemilik bangunan masih sanggup untuk menangani sendiri maka pihak terkait tidak memberikan bantuan sosial bagi korban.

Tabel 1. Dimensi Koordinasi

No	Dimensi	Temuan Penelitian
1.	Hubungan Langsung	Telah dilaksanakan
2.	Kesempatan Awal	Tidak dilaksanakan
3.	Kontinuitas Koordinasi	Telah dilaksanakan
4.	Dinamisme	Terjalin secara dinamis

5.	Tujuan yang jelas	Memiliki tujuan yang jelas
6.	Organisasi yang sederhana	Cukup Fleksibel
7.	Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas	Sangat jelas dan rinci
8.	Komunikasi yang efektif	Sudah efektif
9.	Kepemimpinan supervisi yang efektif	Sudah efektif

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Pada aspek hubungan langsung BPBD dan DPKP sama-sama lembaga pemerintah daerah yang tujuannya untuk membantu masyarakat dalam penanganan bencana, namun tugas dan fungsinya yang berbeda. Antara BPBD dan DPKP ini menjalankan hubungan kinerja antar instansi menjalankan koordinasi secara langsung untuk Kota Banda Aceh, setelah pemadaman selesai, dinas pemadam kebakaran menghubungi BPBD untuk bantuan sosial baik itu tenda pengungsian maupun logistik. Koordinasi yang terjalin antara BPBD dan DPKP Koordinasi yang terjalin tersebut sangat mempengaruhi kecepatan respon dalam penanganan kebakaran, jika pihak yang berkoordinasi cepat tanggap dalam berkoordinasi maka penanganan kebakaran pun akan cepat ditangani.

Kemudian kesempatan awal, dalam penanganan kebakaran tidak dilakukannya perencanaan koordinasi di tahap awal. DPKP tidak pernah memanggil lembaga lain untuk melakukan perencanaan koordinasi dikarenakan setiap lembaga sudah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang berbeda-beda disetiap instansi. Pada saat terjadinya kebakaran, masing-masing instansi sudah tau apa yang

harus dilakukan, jadi tidak adanya perencanaan koordinasi khusus.

Kemudian kontinuitas koordinasi pada saat perencanaan, DPKP dan BPBD tidak melakukan koordinasi, koordinasi DPKP dan BPBD terjadi hanya saat setelah selesai pemadaman kebakaran. Koordinasi DPKP sebelum terjadinya kebakaran hanya dengan pemerintah *gampong* seperti dalam setiap tahun *gampong* melakukan musrembang, dalam kegiatan tersebut pihak DPKP bisa masuk untuk melakukan bimbingan dan edukasi dalam hal pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada pemerintah *gampong*.

Dalam pelaksanaan pelatihan dan edukasi penanganan kebakaran itu tergantung dari pemerintah *gampong* jika tersedianya anggaran. Jika ada anggaran yang disetujui oleh pemerintah kota maka *gampong* hanya menerima. Pelatihan dan edukasi ini tidak hanya dilakukan dengan teori tetapi juga dibarengi dengan prakteknya. Koordinasi DPKP hanya sebatas dengan pihak terkait khususnya BPBD dalam pemasangan tenda dan bantuan sosial atau logistik.

Kemudian Dinamisme, koordinasi yang dilakukan oleh BPBD dan DPKP terjalin secara dinamis, saling kait mengait, artinya DPKP membutuhkan DPKP dan

juga sebaliknya DPKP membutuhkan DPKP. Pada saat situasi darurat kebakaran, koordinasi yang dilakukan tetap sesuai SOP, koordinasi yang dilakukan tetap sama yaitu pertama menghubungi pln untuk memadamkan listrik lalu menghubungi TNI/POLRI, selanjutnya saat api sudah padam maka akan dilanjutkan kepengurusan oleh BPBD.

Kemudian Tujuan yang jelas, tujuan BPBD dan DPKP melaksanakan koordinasi yaitu untuk mempercepat kinerja pada saat kejadian di lapangan dan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan saat kebakaran terjadi. Jika tidak ada koordinasi dengan pihak atau mitra terkait otomatis yang sebenarnya jika waktu yang dibutuhkan untuk bekerja selama 15 menit, karena terganggunya dengan lingkungan pemukiman warga yang tanpa dikawal oleh TNI/POLRI bisa jadi 1 jam atau 2 jam karena terganggunya dengan masyarakat yang memadati lokasi dengan cara menonton di lokasi kebakaran.

Tujuan yang diharapkan oleh DPKP adalah 100% tetapi untuk mencapai 100% adalah hal yang mustahil. Untuk saat ini yang tercapai hanya sekitar 80%. BPBD dan DPKP terus berusaha mencapai tujuan untuk membantu masyarakat dalam terjadinya bencana, terus memberikan pembelajaran serta pemahaman terhadap masyarakat dalam kebencanaan salah satunya evakuasi mandiri, dan juga memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah terhadap penanganan kebakaran.

Kemudian Organisasi yang sederhana, pada DPKP siapa saja dapat berkoordinasi dengan pihak terkait, yang penting setiap pesan yang disampaikan dapat tercapai. Koordinasi yang terjalin pada DPKP ini melalui komunikasi darurat jadi siapa saja bisa berkoordinasi baik itu

pimpinan maupun staff, karena jika hanya dibebankan pada seseorang maka akan menyulitkan jalannya koordinasi. Terlebih pada setiap instansi sudah terbagi bidangnya masing-masing, yang tugas dan fungsinya sudah sangat jelas. Jadi tidak ada tumpang tindih dalam hal pelaksanaan di lapangan maupun dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Semuanya bisa berperan untuk menunjang efektivitas durasi penanganan kebakaran. Struktur organisasi BPBD dan DPKP sudah cukup fleksibel untuk menjalankan koordinasi, siapa saja dapat menjalankan koordinasi tersebut.

Kemudian perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, Perumusan wewenang dan tanggung jawab sudah dilakukan dengan sangat jelas dan rinci, dimana pada setiap pegawainya sudah dibagi pada bidang masing-masing dan pada bidang tersebut pula sudah jelas tugas dan fungsi yang harus dilakukan. BPBD terbagi menjadi 3 bidang yaitu kesiapsiagaan, logistik dan kedaruratan dan juga bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan DPKP terbagi menjadi dua bidang yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan bidang pemadaman. Jika terjadinya suatu bencana maka bidang tersebut akan terus bergerak untuk membantu masyarakat dalam penanganan bencana. Dan juga tersedianya piket pegawai untuk berjaga-jaga dikarenakan bencana yang terjadi tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi.

Pembagian wewenang dan Tanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi tergantung kepada kepala dinas, artinya kepala dinas mengalokasikan kewenangan dan tanggungjawab sesuatu hal kepada bidang-bidang terkait. Wewenang dan tanggung jawab yang

diberikan kepada para pegawai atau non PNS yang bekerja di DPKP sudah melakukan tugasnya sesuai tupoksi yang berlaku. Pembagian wewenang dan tanggung jawab sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing di setiap bidang. Maka berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa DPKP memiliki rumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Kemudian Komunikasi yang efektif, komunikasi yang dilakukan oleh BPBD dan DPKP dalam menjalankan koordinasi sudah efektif. Komunikasi tersebut terjadi secara tertulis dan juga secara lisan. Komunikasi yang dilakukan secara lisan seperti dalam hal pemberitahuan bencana kebakaran yang diinformasikan melalui media telepon, wawancara dengan pihak korban untuk mendata jumlah korban kebakaran dan penyebaran informasi melalui radio terkait telah terjadinya kebakaran. Sedangkan komunikasi secara tertulis seperti rujukan pemerintah desa yang berisikan data korban kebakaran yang ditujukan kepada kecamatan dan diteruskan kepada DPKP dan juga komunikasi melalui media cetak mengenai sosialisasi penanggulangan kebakaran.

Terakhir Kepemimpinan supervisi yang efektif, dalam menjamin berjalannya koordinasi dalam penanggulangan kebakaran pemukiman, peran pimpinan tetap diutamakan, karena setiap melaksanakan tugas harus adanya support dari pimpinan. Setiap kegiatan pelaksanaan baik itu sosialisasi, simulasi dan juga penanggulangan kebakaran peran pimpinan itu sangat penting, pimpinan tetap hadir karena sangat mempengaruhi kinerja para bawahannya. Jika pimpinan hadir di setiap kegiatan maka petugas akan maksimal dalam melaksanakan tugasnya,

jika ada pimpinan maka si petugas akan lebih semangat dalam bekerja karena punya support dari pimpinan, jika tidak ada pimpinan maka akan merasa terabaikan. Jadi akan sangat berperan akan kehadiran pimpinan di setiap kegiatan.

Pimpinan BPBD dan DPKP akan melakukan supervisi terhadap berbagai kegiatan penanggulangan kebakaran pemukiman. Setiap pimpinan akan hadir pada saat penanganan kebakaran. Jika memang berhalangan hadir seperti ada tugas diluar kota maka bawahannya akan mengirimkan laporan informasi.

3. Kendala Dalam Penanggulangan Kebakaran

Kendala merujuk pada kondisi di mana suatu gejala, hambatan, atau kesulitan menjadi penghalang tercapainya suatu tujuan, baik berupa halangan, rintangan, atau situasi yang membatasi, menghalangi, atau menghambat pencapaian sasaran yang diinginkan. Kendala sering terjadi dalam situasi kebencanaan terutama dalam hal penanggulangan kebencanaan tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor dan juga melibatkan beberapa pihak (Soewarno, Hasmiana 2016).

Kendala yang dihadapi oleh pihak pemadam adalah pada saat terjadinya kebakaran disaat jam genting seperti pada pukul 02.00 sampai 05.00 pagi. Dimana pada jam tersebut pihak pln susah untuk dihubungi untuk memadamkan listrik. Apabila listrik tidak dipadamkan pada saat penanggulangan kebakaran, maka ditakutkan akan terjadinya kecelakaan kerja pada petugas kebakaran seperti tersengatnya listrik dan juga dapat menyebabkan konslet listrik yang membuat kebakaran menjadi lebih luas.

Untuk kendala lain tidak ada yang signifikan, terkait dengan penyampaian pesan banyak lapisan dari masyarakat yang dapat diberikan informasi maupun himbauan melalui media sosial baik itu melalui instagram maupun tiktok, untuk masyarakat yang awam dapat di sampaikan pesan melalui radio dan televisi maupun diberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat, namun untuk setiap tahapan dalam turun ke desa untuk memberikan sosialisasi itu membutuhkan banyak anggaran dan juga memakan waktu. Dalam pemberian sosialisasi atau edukasi ini ada yang membutuhkan anggaran maupun tidak, seperti pemberian informasi di media yang tidak membutuhkan anggaran seperti instagram maupun tiktok, tetapi hal tersebut konsumsinya terbatas, untuk lapisan masyarakat yang bawah tidak dapat diserap atau terakomodir dengan baik. Maka dari itu butuh turun ke desa walaupun butuh anggaran yang lumayan besar.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh maka menunjukkan bahwa sinergitas antar lembaga dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan baik. Setiap instansi terkait bersama sama melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Terkait lintasan armada kebakaran, ada pihak TNI/POLRI dalam menjaga keamanan serta juga relawan rapi dan Orari yang membantu dalam akses lalu lintas. Meskipun dalam hal partisipasi masyarakat

itu masih kurang. Adapun saran atau rekomendasi dari peneliti diharapkan kepada BPBD dan DPKP kota Banda Aceh agar meningkatkan sistem komando agar koordinasi lapangan lebih efisien dan peningkatan sistem komunikasi darurat satu pintu agar informasi lebih cepat diterima oleh semua pihak terkait. Sedangkan untuk masyarakat diharapkan agar lebih berpartisipasi dengan baik saat terjadinya kebakaran.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Misran. 2022. "Petugas Pemadam Banda Aceh & Warga Berhasil Selamatkan Satu Rumah Terbakar Saat Dini Hari Di Batoh." *Serambinews.com*. 2022. <https://aceh.tribunnews.com/2022/06/01/petugas-pemadam-banda-aceh-warga-berhasil-selamatkan-satu-rumah-terbakar-saat-dini-hari-di-batoh>.
- Cahyo, Dhandi Tri, and Deded Chandra. 2023. "Analisis Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Di Pemukiman Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (3): 23761–65.
- Dendi, Okta Tri, Doris Febriyanti, and Isabella Isabella. 2022. "Kinerja Bpbd Dalam Menanggulangi Kebakaran Di Daerah Pasar Bawah Kota Lahat Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 12 (2): 95–105. <https://doi.org/10.33592/jiia.v12i6.2854>.
- Depriyanti. 2022. "MITIGASI BENCANA KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

- DAERAH (BPBD) KABUPATEN ACEH SINGKIL,” 2022.
- Disdukcapil. 2024. “Info Grafis Penduduk Kota Banda Aceh.” 2024. <https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/info-grafis-penduduk-kota-banda-aceh/>.
- Dwinugraha, Akbar Pandu. 2017. “SINERGITAS AKTOR KEPENTINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang).” *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2 (1): 1–7. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1421>.
- Fardiah, Dedeh, Ferry Darmawan, Rini Rinawati, Viky Edya, Martina Supaat, and Ibrahim Abdullah. 2023. “JCC Sebagai Komunikasi Digital Terpadu Informasi Kebencanaan Di Jawa Barat JCC as Integrated Digital Communication for Disaster Information in West Java” 18. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss1.art4>.
- Jumansyah, Jumansyah, Anwar Alaydrus, Budiman Budiman, and Bebika Alamsyah. 2021. “Urban Disaster Management in Government Communication Perspective Penanggulangan Bencana Perkotaan Dalam” 9 (2). <https://doi.org/10.21070/kanal.v9i2.1057>.
- Marfuah, Umi, Didi Sunardi, and Aria Purnamasari Dewi. 2020. “Evaluasi Pelatihan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Di Lingkungan Rumah Tangga” 3: 470–78.
- Muthmainnah, Siti. 2022. “Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman Di Kota Langsa Provinsi Aceh.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Nurwulandari, Furi Sari. 2017. “Kajian Mitigasi Bencana Kebakaran Di Permukiman Padat.” *Infomatek* 18 (1): 27. <https://doi.org/10.23969/infomatek.v18i1.506>.
- Pane, Mariaty, Rahmat Rejoni, and Universitas Malikussaleh. 2012. “Pendekatan Penanggulangan Kebakaran Pada Permukiman Padat Perkotaan” 1 (1): 52–63.
- “Pergub Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja BPBA.” n.d.
- Rahmawati, Annisa. 2022. “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.” *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–10.
- Rahmawati, Triana. 2014. “Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2 (4): 641–47.
- Ramadhan, Dinda. 2016. “Pola Komunikasi Pimpinan PTPN V Kebun Sei Pagar Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan” 5: 1–23.
- Saragih, Ridha Amini Insyania, and Fatma Lestari. 2023. “Kerentanan Kebakaran Daerah Perkotaan: Analisis Risiko Dan Pemetaan Di Jakarta Timur, Indonesia.” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4 (2): 1974–

81.
<https://doi.org/10.31004/jkt.v4i2.153>
11.
- Soewarno, Hasmiana, Faiza. 2016. “Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Unsyiah Banda Aceh” 1: 21–30.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman, Jasmine Azzahra Maharani, Nyoman Anita Damayanti, and Wardah Tsamarah Azzahla. 2023. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Kolaborasi Interprofesi Dan Lintas Sektor Dalam Intervensi Prioritas Penurunan Stunting Di Wilayah Puskesmas Ujungpangkah.” *Jurnal Ners* 7 (2): 858–63. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.14510>.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 2007.

